



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN SUDARMAN NO. 1 TELP. (0331) – 424044 JEMBER 68111

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 065/ 1 / HK /1.12/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Bagian Hukum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini tersebut dalam lampiran.

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini bertujuan untuk :
- (1) memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
  - (2) mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam :
- a. perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
  - b. perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
  - d. pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
  - e. evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 2 Januari 2023

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AGUS BUDIARTO, S.H., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19690828 199503 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember**

Instansi	: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
Tujuan	: Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan.
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi dan urusan pemerintahan bidang penunjang serta tugas pembantuan.
Fungsi	: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah;</li><li>b. Penyiapan dan penyajian bahan rancangan produk hukum Kabupaten berupa regulasi maupun legislasi Kabupaten;</li><li>c. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Penyelenggaraan Pemerintah;</li><li>d. Penyiapan telaah bahan pertimbangan hukum dan pelayanan hukum Kabupaten maupun Produk Hukum Kabupaten terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;</li><li>e. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Kabupaten Jember.</li></ul>
Indikator Tujuan	: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Jumlah Produk Hukum Daerah;</li><li>b. Pelayanan dan Bantuan Hukum;</li><li>c. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum;</li></ul>

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Perda yang diusulkan ke DPRD;</li> <li>2. Peraturan Bupati yang dihasilkan;</li> <li>3. Jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan.</li> </ol>	Jumlah OPD yang mengajukan penerbitan Keputusan Bupati, Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah.	OPD di Pemerintah Kabupaten Jember	Bagian Hukum Setda. Kab. Jember
Meningkatnya Pendampingan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan;</li> <li>2. Prosentase bantuan hukum bagi masyarakat miskin</li> </ol>	Jumlah perkara yang terfasilitasi serta jumlah bantuan hukum masyarakat miskin yang diberikan	OBH yang terakreditasi di Kabupaten Jember	Bagian Hukum Setda. Kab. Jember
Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Penyuluhan Hukum;</li> <li>2. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum Daerah;</li> <li>3. Jumlah Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum.</li> </ol>	Jumlah Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Produk Hukum Daerah, Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	Bagian Hukum Setda. Kab. Jember	Bagian Hukum Setda. Kab. Jember